

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, Yudi. O. (2017). *Komunikasi dalam Perspektif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 1*, Hal 1-11.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Atmasasmita, R. (1992). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Erasco.
- Candra, M. (n.d.). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan Anak di Bawah Umur*. Jakarta: Kencana.
- Dipa Pratama, d. (2016). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Rangka Mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Layak Anak (Studi pada Dinas Kota Malang). *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Volume. 1, No. 1*, Hal. 15-23.
- Fithriyyah, M. U. (2017). Studi Implementasi Kebijakan Kota Layak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Volume 9, Nomor 02*, Hal. 154-171.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hidayat, A. E. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak. *Journal of Public Policy and Management Review, Volume. 5, No. 2*, Hal. 55-70.
- Huraerah, Abu. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ika Pasca Himawati, d. (2016). Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program "Kota Layak Anak" di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vo. 5, No. 1*, Hal. 37-49.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Karyanto, Ibe. (1999). *Korban Kekerasan Sistematis, dalam Suranto*. Jakarta: Pokja Anak Pinggiran.

- Lestari, Dwi. P. (2018). Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. *Jurnal Perempuan dan Anak, Vol. 2 No. 1*, Hal. 315-338.
- M. Auldrin Ponto, d. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembangunan Berbasis Lingkungan Membangun Prasarana Fisik, Sosial dan Ekonomi di Kel. Karombasan Selatan, Kec. Wanea Kota Manado. *Jurnal Ilmu Sosial & Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Vol. 3*, Hal. 36-52.
- Maksum, S. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 8 No. 1*, Hal. 38-52.
- Melati, D. P. (2015). Implementasi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1*, Hal. 33-48.
- Moeleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik, Vol. 6 No.2*, Hal. 195-224.
- Mursalim, Siti. W. (n.d.). Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. 4 No. 1*, Hal. 126-138.
- Ramdhani, A. R. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik, Vol. 11 No. 1*, Hal. 1-12.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33*, Hlm. 81-95.
- Rijanta, D. W. (Agustus 2012). Lingkungan Kota Layak Anak (Child-Friendly City) Berdasarkan Persepsi Orangtua di Kota Yogyakarta. *Jurnal Bumi Lestari, Vol. 12 No. 2*, hal. 211-216.
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 27, No. 1*, Hal. 7-23.
- Saimima, Y. B. (2018). Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Ambon. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, Vol. 2 No. 2*, Hal. 475-480.

- Sidauruk, P. L. (2013). Peranan Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Pusat Layanan Internet Kecamatan (Kasus di Provinsi Bangka Belitung). *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 3, No. 1, Hal. 81-113.
- Suhendi, M. A. (2014). Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. *Sosio Konsepsia*, Vol. 4 No. 1, Hal. 215-235.
- Sumakul, B. J. (2015). Peranan Komunikasi Keluarga dalam Pembentukan Identitas Remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Acta Diurna*, Vol. 4, No. 4.
- Syaukani, d. (2006). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Wike, Endah. S. (2017). Analisis Implementasi Tentang Kebijakan Perlindungan Terhadap Anak di Kota Malang. *Proceeding ISS Universitas Brawijaya*, Hal. 52-76.